

# REFLEKSI FILOSOFIS TERHADAP REFORMASI AKHLAK (MORALITAS) DAN MASA DEPAN BANGSA

Armaidly Armawi\*)

*Dewasa ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin marak diwarnai oleh beragam peristiwa kekerasan yang menciptakan isu-isu SARA dan pelanggaran HAM sebagai faktor pemicunya. Peristiwa-peristiwa kekerasan konkrit yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah.*

*Berbagai peristiwa kekerasan yang melanda tanah air belakangan ini tak lepas dari bermulanya krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang diikuti dengan krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah dipandang oleh sebagian besar pengamat sebagai faktor penyebab sangat sensitif dan emosionalnya sebagian pihak dalam menanggapi dan menyikapi berbagai persoalan. Namun di balik berbagai krisis yang menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan kolektif tersebut timbul pertanyaan; apakah sebagian masyarakat kita tengah mengalami krisis identitas diri yang bermuara pada krisis moral dan spritual?*

Munculnya pertanyaan bernada gugatan itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa di akhir-akhir ini tindakan-tindakan masyarakat sering tidak rasional, dan ambang batas toleransi masyarakat dalam menghadapi suatu persoalan sangat tipis sekali. Hanya karena hal-hal sepele, karena cekcok mulut, me-

rasa dihina, dendam pribadi dan hal-hal kecil lainnya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif yang berskala besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan anggota masyarakat dengan membawa korban jiwa dan harta yang sangat besar jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini masyarakat seakan-akan sedang

---

\*) Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

menghadapi gejala *lost of soul* atau penyakit kekosongan rasa kemanusiaan dimana manusia hidup seakan-akan tidak ada kontrol, tidak mengetahui tujuan hidupnya serta hidup tanpa makna dan tanpa jiwa.

Pada sisi lain semakin transparannya penyakit KKN dalam kehidupan pemerintahan mengindikasikan bahwa selain masyarakat, ternyata pemerintah yang menjadi figur panutan warga negara dalam berperilaku, juga telah kehilangan legitimasi akhlak. Dengan demikian dipastikan telah terjadi kepincangan rohani dalam segenap komponen bangsa Indonesia. Kondisi inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai manifestasi dari krisis moral atau akhlak.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut tentu saja diperlukan kesadaran dari seluruh komponen bangsa untuk dapat melakukan *self corection* terhadap berbagai penyimpangan yang telah diperbuat, agar dalam menghadapi era baru yang lebih menantang tidak terjebak lagi dalam perilaku yang sama.

### Pengertian Akhlak

Bila kita menyatakan krisis akhlak atau moralitas, hal pertama yang perlu dipahami adalah pengertian dari akhlak itu sendiri agar tidak terjebak dalam kesalahan semantik. Banyak pe-

mikir telah memberikan batasan tentang hal termaksud. Bertens, misalnya memandang akhlak atau moralitas sebagai keseluruhan asas dari nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Semua bangsa mempunyai pengalaman terhadap baik dan buruk, tetapi tidak selalu ada pendapat yang sama tentang apa yang harus dianggap baik atau buruk itu. Pengertian tentang baik dan buruk merupakan sesuatu yang umum, yang terdapat di mana-mana dan di segala zaman. Dengan kata lain, akhlak atau moralitas merupakan suatu fenomena manusiawi (kemanusiaan) yang universal (Bertens, K. 1997: 7 - 12).

Menurut Gunawan Setiardja (1997:91), apabila kita berbicara mengenai moral atau "*ethos*" seseorang atau sekelompok orang, maka yang dimaksud adalah bukan hanya apa yang biasa dilakukan orang atau sekelompok orang itu, melainkan juga apa yang menjadi pemikiran dan pendirian mereka mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan. Perbuatan-perbuatan atau perilaku orang pada umumnya, tidak selalu adalah tanda, adalah manifestasi keyakinan atau pandangan hidup orang.

Padanan pengertian akhlak dalam istilah kefilosofan ialah

etika dan moral. Dalam penggunaannya sebagai kata sifat, moral dapat dimaknakan sebagai (1) sesuatu yang menyangkut penilaian atau pengajaran tentang kebaikan atau keburukan watak atau kelakuan; (2) sesuatu yang beresujuan dengan ukuran-ukuran maupun kelakuan yang baik; (3) sesuatu yang timbul dari hati nurani; (4) hal yang punya dampak kejiwaan, bukan keragaan; (5) hal yang didasarkan atas kelayakan daripada bukti; (6) prinsip yang diajarkan (atau disimpulkan) lewat sebuah cerita atau kejadian; (7) aturan-aturan atau kebiasaan tingkah laku, khususnya tingkah laku seksual. (*The American Heritage Concise Dictionary*, dalam Nurcholish Madjid, 1998).

Dalam konteks Islam, akhlak dimaknai sebagai pandangan dan sikap hidup yang terpuji, yang berlandaskan pada ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Apabila semangat Qurani memancar dalam kehidupan seseorang atau suatu masyarakat, maka hal itu merupakan pertanda bahwa masalah akhlak telah eksis dalam dirinya.

Secara lebih terperinci obyek atau lapangan akhlak dalam Islam itu meliputi bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan penciptanya, manusia

terhadap dirinya sendiri, manusia terhadap keluarganya, manusia terhadap masyarakatnya, manusia yang satu dengan masyarakat lainnya, manusia terhadap hewan, dan manusia terhadap makhluk lain. (Mansyur, 1987:16)

Berangkat dari hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa — tentang baik atau buruk, baik dari sudut rasionalitas akal maupun dari sudut ajaran agama — akhlak bukan merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia sewaktu dilahirkan melainkan akhlak terus muncul melalui pembinaan dan proses sosialisasi. Jadi akhlak seseorang individu akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh proses pembinaan berlangsung pada diri individu. Pembinaan tersebut melibatkan lingkungan sesama individu, mulai dari lingkungan yang terdekat seperti keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat luas sampai pada negara atau pemerintah.

### Fenomena Krisis Akhlak

Krisis akhlak terjadi ketika perangai, budi, tabiat, adab seseorang atau kelompok orang tidak lagi didasarkan oleh tuntunan ideal yang seharusnya (*das sollen*) dijadikan pegangan, yaitu nilai-nilai agama dan budaya. Di dalam agama obyek atau lapangan akhlak itu secara garis

besar mencakup persoalan bagaimana hubungan yang seharusnya antara manusia dengan Khaliknya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Krisis moral atau akhlak sebagai penyakit kemanusiaan memang sering menjadi sorotan berkenaan dengan dinamika kehidupan sosial ekonomi di tengah masyarakat yang semakin rasional dan sekuler dewasa ini. Krisis kemanusiaan ini mungkin tidak menunjukkan gejala yang *vulgar* dan tidak terartikulasi secara matematis karena sifatnya yang seringkali *massive*. Namun fenomenanya dapat dilihat dalam beragam bentuk dan kecenderungan.

Krisis moralitas atau dapat disebut pula sebagai krisis sosio kultural dalam kehidupan masyarakat kita setidaknya dapat dilihat dari beberapa gejala umum.

Pertama, yang berupa konfensional dengan berkembangnya kuantitas dan kualitas berbagai bentuk kriminalitas seperti penjarahan, pembunuhan, perampokan yang semakin menonjol akhir-akhir ini.

Kedua, secara inkonfensional dan struktural berkembang pula krisis etika profesi yang muncul dalam bentuk pelaksanaan korupsi, kolusi dan nepotisme, penindasan dan pelanggaran

HAM, dan krisis perilaku dalam sistem kehidupan yang merugikan hajat hidup orang banyak.

Ketiga, pergeseran nilai atau perilaku dalam hubungan sosial antar sesama yang menunjukkan anomie dan tererosinya kesalehan dan kesantunan individu atau kelompok masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kecenderungan krisis moral dalam berbagai bentuknya di Indonesia akhir-akhir ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sekaligus ongkos sosialnya (*social cost*) yang harus dibayar mahal dari kesalahan-kesalahan sistem kehidupan nasional kita yang tidak terkontrol pada masa lalu. Proses reformasi dalam bidang ekonomi, politik dan hukum yang sedang digulirkan tidak akan berarti banyak bila tidak diikuti oleh reformasi akhlak atau moralitas dari segenap komponen bangsa. Krisis akhlak atau moralitas yang menjangkiti segenap lapisan inilah yang selanjutnya menyulut kebencian masyarakat yang luapannya muncul setelah masyarakat lepas dari keterkungungannya selama rezim Orde Baru berkuasa.

### **Reformasi Akhlak di Tengah Reformasi Ekonomi, Politik dan Hukum**

Proses reformasi dalam ber-

bagai aspek kehidupan memang tengah dijalani bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, kita melihat keseriusan wakil rakyat dan pemerintah merumuskan berbagai rancangan perundang-undangan bidang politik yang akan mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan masyarakat tampaknya mulai didengar dan direspons dengan baik oleh pemerintah. Di bidang ekonomi, kita mendengar di kumandangkannya sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah tampaknya mulai bersimpati kepada golongan ekonomi menengah ke bawah yang selama rezim orde baru berkuasa merasa "ditinggalkan". Berbagai kebijakan ekonomi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kehidupan ekonomi yang demokratis. Upaya-upaya membantu masyarakat miskin telah nampak digulirkan. Program Jaring Pengaman Sosial (*social safety net*) telah digulirkan guna mencegah bertambahnya masyarakat yang berklasifikasi miskin.

Demikian pula halnya dalam bidang hukum, telah nampak adanya upaya reformasi. Upaya Kejaksaan Agung untuk menuntaskan berbagai kasus yang berdimensi KKN telah semakin menambah keyakinan akan aktualisasi proses reformasi. Pembebasan para Napol dan

Tapol juga merupakan gebrakan reformasi, dan banyak lagi contoh lain yang membuktikan bahwa proses reformasi telah berjalan menuju kepada terwujudnya suatu masyarakat madani.

Namun persoalan yang tampak merisaukan kita adalah, ditengah intensnya gerakan reformasi di berbagai aspek kehidupan bangsa, mengapa tindakan-tindakan destruktif masyarakat masih saja terjadi? Mengapa kasus kerusuhan di berbagai kota masih saja berlangsung. Kekerasan nampak merajalela dimana, para provokator kerusuhan berbau SARA masih saja rela memunculkan penderitaan dan keresahan masyarakat sekalipun perangkat hukum semakin di berdayakan dan semakin tegasnya pihak keamanan. Mengapa perampokan, pencurian, pembunuhan dan penganiayaan masih tetap berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Apa sesungguhnya yang menjangkiti hati masyarakat sehingga gerakan-gerakan yang amoral tetap lestari.

Ketika reformasi ekonomi, politik dan hukum tengah berjalan dan belum selesai, persoalan amoral terus menjamur di hati sebagian masyarakat. Oleh karena itu statement yang perlu dipikirkan adalah "darimana kita harus mulai untuk memperbaiki keadaan tersebut agar

kecenderungan negatif itu berakhir. Kalau reformasi di bidang ekonomi, politik dan hukum tidak sukses dalam mengatasi kechaosan masyarakat, maka perlu dicermati segmen kehidupan lain yang mungkin menjadi akar penyebabnya, dan itulah yang mesti direformasi.

Harus diakui bahwa berbagai masalah kompleks yang menimpa negeri ini tak lepas dari kebebasan akhlak atau moral sebagai warga Indonesia. Segenap komponen bangsa, baik rakyat maupun elit sedang mengalami degradasi akhlak atau miskin moralitas. Karena itu keadaan ini perlu direformasi agar sikap dan perilaku bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai akhlak atau moralitas yang baik.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan reformasi akhlak itu atau pihak mana yang perlu terlibat dalam gerakan reformasi akhlak (moralitas)? Dalam rangka ini mau tidak mau seluruh komponen bangsa harus mengupayakan baik pada tingkat keluarga, masyarakat, maupun oleh lembaga pemerintah. Proses pendidikan akhlak hendaknya lebih ditumbuhsururkan. Di sinilah letak urgennya pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama bagi segenap warga bangsa Indonesia.

Lingkungan keluarga menga-

jarkan pada seseorang individu bagaimana akhlak yang baik dalam lingkup hubungan antar manusia dengan manusia lain, manusia terhadap dirinya sendiri, manusia terhadap keluarga, dan manusia terhadap masyarakat. Lingkungan pendidikan, selain memantapkan ajaran akhlak yang didapatkan seorang individu di dalam keluarga, juga bertugas mengajarkan akhlak yang baik terhadap anak didik tentang bagaimana hubungan antara kelompok masyarakat satu sama lain dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Tugas lingkungan pendidikan ini bisa dijalankan melalui pendidikan formal (sekolah) dan bisa juga dijalankan melalui pendidikan informal oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama seperti Ulama, Pendeta, Biksu dan lain-lain.

Pemerintah atau penguasa juga mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan warga negaranya. Di samping menyediakan sarana pendidikan formal atau non formal untuk proses pendidikan individu, warga negara, namun para aparat, penguasa atau pemerintah juga harus memberikan pendidikan akhlak pada warga negaranya dalam bentuk memberi teladan atau panutan yang dapat dijadikan figur ideal yang pantas ditiru oleh warga negara. Artinya

diperlukan pemimpin pemerintahan yang setiap ucapan, sikap, dan tingkah lakunya dapat dijadikan pedoman yang baik bagi warga negara. Akhir-akhir ini kelihatannya institusi-institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan akhlak individu manusia itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya krisis moral atau akhlak pada masyarakat Indonesia.

### **Ketahanan Pribadi Dalam Konteks Masa Depan**

Gerakan reformasi akhlak atau moralitas dalam konteks gerakan budaya yang seharusnya digulirkan merupakan upaya membangun ketahanan pribadi warga Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu *good citizenship*. Hal ini penting dilakukan mengingat tantangan ke depan yang akan dialami bangsa Indonesia begitu sangat kompleks. Era mendatang adalah era yang sarat dengan benturan nilai dan polarisasi hidup, suatu fase kehidupan yang membutuhkan kemantapan akhlak dalam menyahutinya.

Pembentukan ketahanan pribadi melalui gerakan reformasi akhlak atau moralitas tampaknya mengundang visi jauh ke depan sebagai alternatif persiapan memasuki gerbang kehidup-

an baru. Ketahanan pribadi sangat penting untuk ditumbuhkan, sebab ia akan menjadi fundamen bagi pemantapan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan bangsa/nasional secara keseluruhan. Artinya ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan bangsa/nasional merupakan implikasi dari tercapainya ketahanan pribadi. Pribadi yang tangguh merupakan modal sosial yang tak ternilai harganya bagi persiapan menapaki masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Ketahanan pribadi akan terwujud apabila dalam diri seseorang tertanam nilai-nilai akhlak atau moralitas yang diperolehnya melalui proses pendidikan di berbagai jenjang kehidupan. Demikian pula halnya ketahanan pribadi akan terpancar melalui kemampuan seseorang mengejawantakan nilai-nilai tersebut dalam hidup kesehariannya. Kemantapan pengamalan nilai-nilai moral/akhlak sejak dini merupakan awal yang cerah bagi pemantapan ketahanan pribadi dalam menapaki kehidupan hari esok yang lebih dilematis dan kompleks.

Oleh karena itu ketahanan pribadi perlu dibangun agar setiap diri memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan, ancaman, tantangan dan

gangguan yang menghadang baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal sehingga ia tetap eksis dan survive dalam menjalani alur kehidupan keseharian yang mesti dilaluinya.

### Penutup

Tidak disangsikan bahwa bangsa Indonesia tengah dilanda krisis multidimensi baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun di bidang hankam. Krisis ini berawal dari krisis moneter yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi serta krisis kepercayaan. Di antara sekian banyak dimensi krisis, yang sebenarnya menjadi akar masalah adalah krisis akhlak atau moralitas. Krisis terakhir inilah yang sebenarnya memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memunculkan perilaku amoral di kalangan masyarakat.

Segecap komponen bangsa, baik rakyat pada umumnya maupun elit pada khususnya mengalami kemiskinan moralitas. Pemahaman dan pengamalan agama dalam konteks sosial sangatlah kurang sehingga mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi. Upaya mengatasi krisis ekonomi, politik, dan hu-

kum misalnya, tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa harus diikuti dengan memperbaiki krisis moralitas atau akhlak. Untuk itu kita perlu melakukan reformasi moralitas atau akhlak melalui gerakan pemberdayaan fungsional (dalam konteks gerakan budaya) bidang pendidikan yang pembinaannya baik pada level keluarga, masyarakat, maupun level pemerintah (formal). Hal ini dilakukan dalam rangka membangun kembali ketahanan pribadi setiap warga masyarakat Indonesia baik rakyat maupun elit/pemerintah agar memiliki kesiapan mental menyongsong dan memasuki masa depan yang sarat dengan berbagai tantangan.

### Daftar Pustaka

- Bertens K. 1997. *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunawan Setiardja A., 1997. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius Yogyakarta dan BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Nurcholish Madjid., 1998. Konsep dan Pengertian Akhlak Bangsa, dalam Tim Kahmi Jaya (Ed). *Indonesia Di simpang Jalan*, Mizan Pustaka, Bandung.